



BUPATI SAMBAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama, dan dalam melaksanakan tugas Kepala Daerah berwenang menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sambas serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Sambas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 32);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 28);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2017 tentang Persetujuan 3 (Tiga) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS
dan
BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp	1.596.330.310.874,00
2. Belanja Daerah	Rp	1.619.835.426.412,23
	Surplus/(Defisit)	Rp (23.505.115.538,23)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan	Rp	100.967.658.389,56
b. Pengeluaran	Rp	77.462.542.851,33
	Pembiayaan Netto	Rp 23.505.115.538,23
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	103.747.915.235,00
b. Dana Perimbangan	Rp	1.261.783.944.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	230.798.451.639,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah	Rp	22.473.996.032,00
b. Retribusi Daerah	Rp	3.910.208.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	3.683.872.859,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp	73.679.838.344,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil	Rp	28.073.858.000,00
b. Dana Alokasi Umum	Rp	873.609.250.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	Rp	360.100.836.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah	Rp	1.963.892.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp	57.028.022.639,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp	171.806.537.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung	Rp	938.367.560.335,96
b. Belanja Langsung	Rp	681.467.866.076,27

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	Rp	643.761.092.132,76
b. Belanja Bunga	Rp	2.000.000.000,00
d. Belanja Hibah	Rp	20.937.200.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp	5.056.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil	Rp	2.638.420.403,20
g. Belanja Bantuan Keuangan	Rp	262.974.847.800,00
h. Belanja Tidak Terduga	Rp	1.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	Rp	52.920.626.032,84
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp	360.772.376.526,87
c. Belanja Modal	Rp	267.774.863.516,56

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan	Rp	100.967.658.389,56
b. Pengeluaran	Rp	77.462.542.851,33

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	Rp	15.967.658.389,56
b. Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp	85.000.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp	2.500.000.000,00
b. Pembayaran Pokok Utang	Rp	74.962.542.851,33

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 14 Desember 2017

BUPATI SAMBAS,

ttd.

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 14 Desember 2017

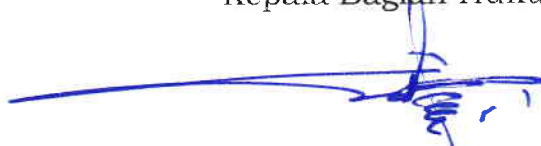
Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,

ttd.

URAY TAJUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



MARJUNI S.H

Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 10/2017

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

Hal 1 dari 1

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.596.330.310.874,00
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	103.747.915.235,00
1.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH	22.473.996.032,00
1.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	3.910.208.000,00
1.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	3.683.872.859,00
1.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	73.679.838.344,00
1.2.	DANA PERIMBANGAN	1.261.783.944.000,00
1.2.1.	BAGI HASIL PAJAK/HASIL BUKAN PAJAK	28.073.858.000,00
1.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	873.609.250.000,00
1.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	360.100.836.000,00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	230.798.451.639,00
1.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	1.963.892.000,00
1.3.3.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	57.028.022.639,00
1.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	171.806.537.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.596.330.310.874,00
2.	BELANJA DAERAH	1.619.835.426.412,23
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	938.367.560.335,96
2.1.1.	BELANJA PEGAWAI	643.761.092.132,76
2.1.2.	BELANJA BUNGA	2.000.000.000,00
2.1.4.	BELANJA HIBAH	20.937.200.000,00
2.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	5.056.000.000,00
2.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	2.638.420.403,20
2.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	262.974.847.800,00
2.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00
2.2.	BELANJA LANGSUNG	681.467.866.076,27
2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	52.920.626.032,84
2.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	360.772.376.526,87
2.2.3.	BELANJA MODAL	267.774.863.516,56
	JUMLAH BELANJA	1.619.835.426.412,23
	SURPLUS/(DEFISIT)	(23.505.115.538,23)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	23.505.115.538,23
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	100.967.658.389,56
3.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	15.967.658.389,56
3.1.4.	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH	85.000.000.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	100.967.658.389,56
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	77.462.542.851,33
3.2.2.	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	2.500.000.000,00
3.2.3.	PEMBAYARAN POKOK UTANG	74.962.542.851,33
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	77.462.542.851,33
	PEMBIAYAAN NETO	23.505.115.538,23
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00

BUPATI SAMBAS,

ttd.

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Kepala Bagian Hukum,

MARJUN, S.H
 Pembina Teknis (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

Hal 1 dari 9

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.596.330.310.874,00
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	103.747.915.235,00
1.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH	22.473.996.032,00
1.1.1.01.	PAJAK HOTEL	442.350.500,00
1.1.1.01.01.	HOTEL	442.350.500,00
1.1.1.02.	PAJAK RESTORAN	1.943.650.380,00
1.1.1.02.01.	RESTORAN	1.943.650.380,00
1.1.1.03.	PAJAK HIBURAN	65.500.000,00
1.1.1.03.01.	HIBURAN	65.500.000,00
1.1.1.04.	PAJAK REKLAME	479.200.500,00
1.1.1.04.01.	REKLAME	479.200.500,00
1.1.1.05.	PAJAK PENERANGAN JALAN	11.752.277.652,00
1.1.1.05.01.	PENERANGAN JALAN	11.752.277.652,00
1.1.1.06.	PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C	650.697.000,00
1.1.1.06.01.	MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	650.697.000,00
1.1.1.07.	PAJAK PARKIR	73.320.000,00
1.1.1.07.01.	PARKIR	73.320.000,00
1.1.1.09.	PAJAK SARANG BURUNG WALET	17.000.000,00
1.1.1.09.01.	PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET	17.000.000,00
1.1.1.10.	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	3.550.000.000,00
1.1.1.10.01.	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	3.550.000.000,00
1.1.1.11.	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	3.500.000.000,00
1.1.1.11.01.	PAJAK BUMI DAN BAGUNAN (PBB) SEKTOR P-2	3.500.000.000,00
1.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	3.910.208.000,00
1.1.2.01.	RETRIBUSI JASA UMUM	2.013.208.000,00
1.1.2.01.01.	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN	55.000.000,00
1.1.2.01.02.	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN	785.000.000,00
1.1.2.01.05.	RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	250.000.000,00
1.1.2.01.06.	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR	198.020.000,00
1.1.2.01.07.	RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	71.500.000,00
1.1.2.01.13.	RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	653.688.000,00
1.1.2.02.	RETRIBUSI JASA USAHA	357.000.000,00
1.1.2.02.01.	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	136.000.000,00
1.1.2.02.02.	RETRIBUSI PASAR GROSIR/PERTOKOAN	40.000.000,00
1.1.2.02.04.	RETRIBUSI TERMINAL	35.000.000,00
1.1.2.02.09.	RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN	146.000.000,00
1.1.2.03.	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	1.540.000.000,00
1.1.2.03.01.	RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	1.540.000.000,00
1.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	3.683.872.859,00
1.1.3.01.	BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	3.683.872.859,00
1.1.3.01.03.	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMDA (DEVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH/BUMD	3.683.872.859,00
1.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	73.679.838.344,00
1.1.4.02.	JASA GIRO	6.988.311.612,31
1.1.4.02.01.	JASA GIRO KAS DAERAH	6.988.311.612,31
1.1.4.04.	TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	15.000.000,00
1.1.4.04.01.	KERUGIAN UANG DAERAH	15.000.000,00
1.1.4.13.	PENDAPATAN DARI ANGSURAN/CICILAN PENJUALAN	582.123.486,00
1.1.4.13.03.	ANGSURAN/CICILAN GANTI KERUGIAN BARANG MILIK DAERAH	582.123.486,00
1.1.4.14.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	66.094.403.245,69
1.1.4.14.01.	PENDAPATAN LAIN-LAIN	827.357.490,44
1.1.4.14.02.	PENDAPATAN BLUD RSUD SAMBAS	23.318.290.399,59
1.1.4.14.03.	PENDAPATAN BLUD RSUD PEMANGKAT	21.448.162.378,40
1.1.4.14.04.	PENDAPATAN BLUD PUSKESMAS	20.500.592.977,26
1.2.	DANA PERIMBANGAN	1.261.783.944.000,00
1.2.1.	BAGI HASIL PAJAK/HASIL BUKAN PAJAK	28.073.858.000,00

1	2	3
2.2.3.26.18.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI HALAMAN	387.700.000,00
2.2.3.26.21.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/ PEMBELIAN HALTE BUS	200.000.000,00
2.2.3.26.22.	BELANJA MODAL PENGADAAN GARASI/TEMPAT PARKIR	100.000.000,00
2.2.3.26.23.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG PEMOTONGAN HEWAN	525.000.000,00
2.2.3.26.63.	BELANJA MODAL PENGADAAN FASILITAS TEMPAT PEMASANGAN SPANDUK	100.000.000,00
2.2.3.26.69.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI TAMAN	110.925.000,00
2.2.3.27.	BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU/KEPUSTAKAAN	710.775.000,00
2.2.3.27.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU ILMU PENGETAHUAN UMUM	90.100.000,00
2.2.3.27.27.	BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU PENGAYAAN, REFERENSI DAN PANDUAN PENDIDIKAN	620.675.000,00
2.2.3.28.	BELANJA MODAL PENGADAAN BARANG BERCORAK KESENIAN, KEBUDAYAAN	136.000.000,00
2.2.3.28.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN MUSIK (TRADISIONAL DAN MODERN)	136.000.000,00
2.2.3.31.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT BANTU	61.000.000,00
2.2.3.31.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN GEROBAK SAMPAH	61.000.000,00
2.2.3.32.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PERAGA/PRAKTEK SEKOLAH	1.699.644.400,00
2.2.3.32.14.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PERAGA/PRAKTEK SEKOLAH BIDANG PENDIDIKAN/KETERAMPILAN LAIN-LAIN	1.699.644.400,00
2.2.3.33.	BELANJA MODAL PENGADAAN RAMBU-RAMBU	145.000.000,00
2.2.3.33.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN RAMBU LALU LINTAS DARAT	145.000.000,00
2.2.3.34.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT OLAH RAGA LAINNYA	30.000.000,00
2.2.3.34.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT OLAH RAGA LAINNYA	30.000.000,00
2.2.3.35.	BELANJA MODAL PADA BLUD	3.194.485.684,00
2.2.3.35.01.	BELANJA MODAL PADA PUSKESMAS BLUD	694.485.684,00
2.2.3.35.02.	BELANJA MODAL PADA RSUD BLUD	2.500.000.000,00
2.2.3.37.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN KODE BATANG (BARCODE)	58.000.000,00
2.2.3.37.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN KODE BATANG (BARCODE).	58.000.000,00
	JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)	1.619.835.426.412,23 (23.505.115.538,23)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	23.505.115.538,23
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	100.967.658.389,56
3.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	15.967.658.389,56
3.1.1.07.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	15.967.658.389,56
3.1.1.07.01.	SISA PENGGUNAAN SILPA	15.967.658.389,56
3.1.4.	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH	85.000.000.000,00
3.1.4.03.	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH DARI LEMBAGA KEUANGAN BANK	85.000.000.000,00
3.1.4.03.01.	BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BANK KALBAR)	85.000.000.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	100.967.658.389,56
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	77.462.542.851,33
3.2.2.	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	2.500.000.000,00
3.2.2.01	PENYERTAAN MODAL DAERAH	2.500.000.000,00
3.2.3.	PEMBAYARAN POKOK UTANG	74.962.542.851,33
3.2.3.07.	PEMBAYARAN POKOK UTANG SEBELUM JATUH TEMPO KEPADA LEMBAGA KEUANGAN BANK	74.962.542.851,33
3.2.3.07.01.	BANK KALBAR	74.962.542.851,33
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN NETO	77.462.542.851,33 23.505.115.538,23
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00

BUPATI SAMBAS,

ttd.

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MARJUNI, S.H
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
 TAHUN ANGGARAN 2018**

Hal 1 dari 1

Kode	Uraian	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6
1.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	976.000.000,00	534.285.126.065,25	475.301.483.270,51	1.009.586.609.335,76
2.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	2.934.208.000,00	18.280.772.996,00	82.746.562.679,41	101.027.335.675,41
3.	URUSAN PILIHAN	0,00	18.215.442.721,51	40.928.981.244,86	59.144.423.966,37
4.	URUSAN PENUNJANG	1.592.420.102.874,00	367.586.218.553,20	82.490.838.881,49	450.077.057.434,69
Jumlah		1.506.330.310.874,00	938.367.560.335,96	681.467.866.076,27	1.619.835.426.412,23
SURPLUS / (DEFISIT)		(23.505.115.538)			

Kode	Uraian	Pembiayaan			SILPA TAB Netto
		Penerimaan	Pengeluaran	Pembiayaan	
1	2	3	4	5	6
4.	URUSAN PENUNJANG	100.967.658.389,56	77.462.542.851,33	23.505.115.538,23	-

BUPATI SAMBAS,

td.

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Kepala Bagian Hukum,

MARJUN, S.H
 Pembina TK I (IV/b)
 NIP. 19680612 199710 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN
 ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1.01.1.01.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	509.641.307.881,37	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	454.420.092.379,55	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	454.420.092.379,55	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	436.585.107.469,26	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	228.921.077.892,34	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	19.870.425.339,91	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	401.075.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	18.698.644.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	949.947.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	10.782.332.810,40	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	70.448.230,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	50.713.814,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	6.388.774.453,61	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	527.665.629,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	676.183.300,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.26.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	136.651.643.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.27.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.742.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.28.	Tunjangan Khusus Guru	9.854.177.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	17.834.984.910,29	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	14.175.114.655,96	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	3.659.870.254,33	
1.01.1.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	55.221.215.501,82	
1.01.1.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.065.376.728,82	
1.01.1.01.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	9.720.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.720.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.720.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	9.720.000,00	
1.01.1.01.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	327.464.448,82	
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	327.464.448,82	
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	327.464.448,82	
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	128.640.000,00	
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	9.600.000,00	
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	189.224.448,82	
1.01.1.01.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	208.080.000,00	
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	208.080.000,00	
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	208.080.000,00	
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	100.800.000,00	
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.14.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	107.280.000,00	
1.01.1.01.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	119.718.600,00	
1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	119.718.600,00	
1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	119.718.600,00	
1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	119.718.600,00	
1.01.1.01.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	818.868.000,00	
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	818.868.000,00	
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	818.868.000,00	
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	733.668.000,00	
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	85.200.000,00	
1.01.1.01.01.01.115.	OPERASIONAL UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)	84.066.160,00	
1.01.1.01.01.01.115.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.115.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.115.5.2.1.01.04.	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	3.000.000,00	

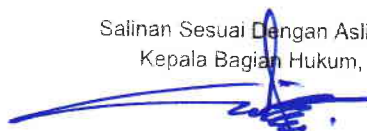
1	2	3	4
1.05.4.05.25.47.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
1.05.4.05.25.47.02.5.2.2.03.17.	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
1.05.4.05.25.47.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	780.000,00	
1.05.4.05.25.47.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	780.000,00	
1.05.4.05.25.47.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
1.05.4.05.25.47.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	
1.05.4.05.25.47.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.253.000,00	
1.05.4.05.25.47.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.853.000,00	
1.05.4.05.25.47.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.501.279.894,79	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.501.279.894,79)	

BUPATI SAMBAS,

ttd.

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



MARJUNI, S.H
Pembina Tk IV/b
NIP. 19680612 199710 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

Hal 1 dari 99

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jenis Belanja			Jumlah
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	28.011.932.891,84	220.349.074.562,11	226.940.475.816,56	475.301.483.270,51
1.01.	PENDIDIKAN	5.868.994.000,00	23.683.514.001,82	19.948.707.500,00	49.501.215.501,82
1.01.01.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5.868.994.000,00	23.683.514.001,82	19.948.707.500,00	49.501.215.501,82
1.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.172.664.000,00	2.892.712.728,82	0,00	4.065.376.728,82
1.01.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	9.720.000,00	0,00	9.720.000,00
1.01.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	327.464.448,82	0,00	327.464.448,82
1.01.01.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	208.080.000,00	0,00	0,00	208.080.000,00
1.01.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,00	119.718.600,00	0,00	119.718.600,00
1.01.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	818.868.000,00	0,00	818.868.000,00
1.01.01.01.115.	Operasional UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	3.000.000,00	81.066.160,00	0,00	84.066.160,00
1.01.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	19.314.050,00	0,00	19.314.050,00
1.01.01.01.14.	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	2.217.600,00	0,00	2.217.600,00
1.01.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	53.241.600,00	0,00	53.241.600,00
1.01.01.01.163.	Operasional Koordinator Pelaksanaan Pendidikan di Wilayah Kecamatan	48.000.000,00	1.102.480.000,00	0,00	1.150.480.000,00
1.01.01.01.165.	Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor	0,00	27.682.500,00	0,00	27.682.500,00
1.01.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	49.375.000,00	0,00	49.375.000,00
1.01.01.01.18.	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	0,00	201.990.750,00	0,00	201.990.750,00
1.01.01.01.19.	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	0,00	79.574.020,00	0,00	79.574.020,00
1.01.01.01.21.	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Perkantoran	913.584.000,00	0,00	0,00	913.584.000,00
1.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	18.000.000,00	229.584.978,00	319.882.500,00	567.467.478,00
1.01.01.02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00
1.01.01.02.11.	Pengadaan Komputer	0,00	0,00	52.200.000,00	52.200.000,00
1.01.01.02.121.	Pembangunan Pagar Gedung Kantor	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.01.01.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	30.750.000,00	0,00	30.750.000,00
1.01.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	120.696.978,00	0,00	120.696.978,00
1.01.01.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	54.758.000,00	0,00	54.758.000,00
1.01.01.02.92.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	0,00	0,00	27.682.500,00	27.682.500,00
1.01.01.02.96.	Pemeliharaan rutin/Berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	18.000.000,00	23.380.000,00	0,00	41.380.000,00
1.01.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
1.01.01.05.17.	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
1.01.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
1.01.01.06.07.	Penyusunan LAKIP SKPD	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
1.01.01.07.	Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
1.01.01.07.01.	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00

1	2	3	4	5	6=3+4+5
4.05.25.01.18.	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	0,00	98.600.000,00	0,00	98.600.000,00
4.05.25.01.19.	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	0,00	52.860.000,00	0,00	52.860.000,00
4.05.25.01.21.	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Perkantoran	81.100.000,00	0,00	0,00	81.100.000,00
4.05.25.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	37.000.000,00	30.000.000,00	67.000.000,00
4.05.25.02.11.	Pengadaan Komputer	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
4.05.25.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
4.05.25.02.29.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4.05.25.02.30.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
4.05.25.07.	Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
4.05.25.07.01.	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.05.25.07.06.	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Jumlah		52.920.626.032,84	360.772.376.526,87	267.774.863.516,56	681.467.866.076,27

BUPATI SAMBAS,

ttd.

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MARJUNI, S.H
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

Hal 1 dari 111

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jenis Belanja			Jumlah
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	33.991.752.891,84	230.380.166.987,11	227.482.444.816,56	491.854.364.695,51
1.01.01.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5.905.594.000,00	29.230.914.001,82	20.084.707.500,00	55.221.215.501,82
1.01.	PENDIDIKAN	5.868.994.000,00	23.683.514.001,82	19.948.707.500,00	49.501.215.501,82
1.01.1.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.172.664.000,00	2.892.712.728,82	-	4.065.376.728,82
1.01.1.01.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	-	9.720.000,00	-	9.720.000,00
1.01.1.01.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	327.464.448,82	-	327.464.448,82
1.01.1.01.01.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	208.080.000,00	-	-	208.080.000,00
1.01.1.01.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	119.718.600,00	-	119.718.600,00
1.01.1.01.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	818.868.000,00	-	818.868.000,00
1.01.1.01.01.01.115.	Operasional UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	3.000.000,00	81.066.160,00	-	84.066.160,00
1.01.1.01.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	19.314.050,00	-	19.314.050,00
1.01.1.01.01.01.14.	Penyediaan peralatan rumah tangga	-	2.217.600,00	-	2.217.600,00
1.01.1.01.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	53.241.600,00	-	53.241.600,00
1.01.1.01.01.01.163	Operasional Koordinator Pelaksanaan Pendidikan di Wilayah Kecamatan	48.000.000,00	1.102.480.000,00	-	1.150.480.000,00
1.01.1.01.01.01.165	Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor	-	27.682.500,00	-	27.682.500,00
1.01.1.01.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	-	49.375.000,00	-	49.375.000,00
1.01.1.01.01.01.18.	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	201.990.750,00	-	201.990.750,00
1.01.1.01.01.01.19.	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	-	79.574.020,00	-	79.574.020,00
1.01.1.01.01.01.21.	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Perkantoran	913.584.000,00	-	-	913.584.000,00
1.01.1.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	18.000.000,00	229.584.978,00	319.882.500,00	567.467.478,00
1.01.1.01.01.02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	-	90.000.000,00	90.000.000,00
1.01.1.01.01.02.11.	Pengadaan Komputer	-	-	52.200.000,00	52.200.000,00
1.01.1.01.01.02.121.	Pembangunan Pagar Gedung Kantor	-	-	150.000.000,00	150.000.000,00
1.01.1.01.01.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	30.750.000,00	-	30.750.000,00
1.01.1.01.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	120.696.978,00	-	120.696.978,00
1.01.1.01.01.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	54.758.000,00	-	54.758.000,00
1.01.1.01.01.02.92.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	-	-	27.682.500,00	27.682.500,00
1.01.1.01.01.02.96.	Pemeliharaan rutin/Berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	18.000.000,00	23.380.000,00	-	41.380.000,00
1.01.1.01.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	30.000.000,00	-	30.000.000,00
1.01.1.01.01.05.17.	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	30.000.000,00	-	30.000.000,00
1.01.1.01.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	5.500.000,00	-	5.500.000,00
1.01.1.01.01.06.07.	Penyusunan LAKIP SKPD	-	5.500.000,00	-	5.500.000,00
1.01.1.01.01.07.	Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00
1.01.1.01.01.07.01.	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jenis Belanja			Jumlah
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
4.05.	PEMERINTAHAN UMUM	124.500.000,00	289.846.450,79	30.000.000,00	444.346.450,79
4.05.4.05.25.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	124.500.000,00	242.846.450,79	-	367.346.450,79
4.05.4.05.25.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00
4.05.4.05.25.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	31.386.450,79	-	31.386.450,79
4.05.4.05.25.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	2.500.000,00	-	2.500.000,00
4.05.4.05.25.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	43.400.000,00	-	-	43.400.000,00
4.05.4.05.25.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	6.000.000,00	-	6.000.000,00
4.05.4.05.25.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00
4.05.4.05.25.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00
4.05.4.05.25.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00
4.05.4.05.25.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00
4.05.4.05.25.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00
4.05.4.05.25.01.18.	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	98.600.000,00	-	98.600.000,00
4.05.4.05.25.01.19.	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	-	52.860.000,00	-	52.860.000,00
4.05.4.05.25.01.21.	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Perkantoran	81.100.000,00	-	-	81.100.000,00
4.05.4.05.25.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	37.000.000,00	30.000.000,00	67.000.000,00
4.05.4.05.25.02.11.	Pengadaan Komputer	-	-	30.000.000,00	30.000.000,00
4.05.4.05.25.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	25.000.000,00	-	25.000.000,00
4.05.4.05.25.02.29.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00
4.05.4.05.25.02.30.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00
4.05.4.05.25.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	-
4.05.4.05.25.07.	Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00
4.05.4.05.25.07.01.	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00
4.05.4.05.25.07.06.	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00
	Jumlah	52.920.026.032,84	360.772.376.526,87	287.774.863.516,56	681.467.866.076,27

BUPATI SAMBAS,

ttd.

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MARJUNI S.H
Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN
KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM
KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2018

Hal 1 dari 2

KODE	URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG			JUMLAH
		PEGAWAI	NON PEGAWAI	PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL		
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	
01.	PELAYANAN UMUM	81.137.006.137,00	294.606.468.203,20	14.398.176.341,00	87.896.868.587,92	9.175.393.200,00	487.213.912.469,12	
01.2.02.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.027.687.579,00	0,00	426.464.841,00	2.245.563.595,84	1.352.330.900,00	6.052.046.915,84	
01.2.06.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	1.882.466.853,00	0,00	1.025.590.000,00	2.440.870.629,09	267.970.000,00	5.616.897.482,09	
01.2.07.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	0,00	0,00	83.120.000,00	1.623.717.195,00	0,00	1.706.837.195,00	
01.2.08.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	213.450.000,00	5.914.300.000,00	0,00	6.127.750.000,00	
01.2.10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.546.226.271,00	0,00	496.008.000,00	3.481.358.700,00	418.420.000,00	6.942.012.971,00	
01.2.13.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0,00	0,00	86.065.000,00	4.588.929.000,00	1.740.006.000,00	6.415.000.000,00	
01.2.14.	STATISTIK	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	
01.2.17.	PERPUSTAKAAN	1.700.875.084,00	0,00	210.990.000,00	691.430.386,50	295.765.000,00	2.899.060.470,50	
01.2.18.	KEARSIPAN	0,00	0,00	0,00	107.250.000,00	0,00	107.250.000,00	
01.3.08.	TRANSMIGRASI	0,00	0,00	35.575.000,00	984.425.000,00	0,00	1.020.000.000,00	
01.4.01.	PERENCANAAN	2.941.566.183,00	0,00	624.730.000,00	3.587.991.035,32	67.000.000,00	7.221.287.218,32	
01.4.02.	KEUANGAN	8.772.141.854,00	294.606.468.203,20	1.343.745.500,00	8.013.533.654,92	0,00	312.735.889.212,12	
01.4.03.	KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.752.199.115,00	0,00	908.789.000,00	6.396.033.949,68	217.770.000,00	10.274.792.064,68	
01.4.04.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	0,00	338.855.000,00	1.342.383.300,00	333.750.000,00	2.014.988.300,00	
01.4.05.	PEMERINTAHAN UMUM	58.513.843.198,00	0,00	8.604.794.000,00	46.229.082.141,57	4.482.381.300,00	117.830.100.639,57	
03.	KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN	2.934.599.664,00	0,00	828.116.000,00	3.301.866.417,62	55.579.000,00	7.120.161.081,62	
03.1.05.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2.934.599.664,00	0,00	828.116.000,00	3.301.866.417,62	55.579.000,00	7.120.161.081,62	
04.	EKONOMI	30.989.930.942,51	0,00	6.266.171.800,00	115.665.454.163,62	162.382.349.632,56	315.303.897.538,69	
04.1.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.071.314.581,00	0,00	1.988.315.000,00	74.273.959.202,72	133.967.806.632,56	215.301.395.416,28	
04.2.01.	TENAGA KERJA	2.343.691.092,00	0,00	567.164.000,00	3.146.139.744,75	40.440.000,00	6.117.434.836,75	

1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7
04.2.03.	PANGAN	0,00	0,00	59.700.000,00	1.398.008.750,00	1.000.885.000,00	2.458.593.750,00
04.2.09.	PERHUBUNGAN	3.005.341.629,00	0,00	689.278.000,00	9.110.533.859,93	17.071.405.000,00	29.876.558.488,93
04.2.11.	KOPERASI/USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.935.245.486,00	0,00	415.160.000,00	2.276.866.515,30	183.887.882,00	5.811.139.883,30
04.2.12.	PENANAMAN MODAL	1.839.239.002,00	0,00	843.984.000,00	1.597.486.450,00	235.000.000,00	4.515.709.452,00
04.3.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.397.434.473,40	0,00	890.519.800,00	7.586.904.365,55	1.548.544.000,00	13.423.402.638,95
04.3.03.	PERTANIAN	12.397.664.679,11	0,00	787.776.000,00	13.631.258.275,37	3.812.990.000,00	30.629.688.954,48
04.3.06.	PERDAGANGAN	0,00	0,00	0,00	1.236.892.000,00	4.495.132.118,00	5.732.024.118,00
04.3.07.	PERINDUSTRIAN	0,00	0,00	4.275.000,00	1.407.405.000,00	26.270.000,00	1.437.950.000,00
05.	LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	5.913.290.000,00	4.091.785.230,00	405.969.000,00	10.411.044.230,00
05.2.05.	LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	5.913.290.000,00	4.091.785.230,00	405.969.000,00	10.411.044.230,00
06.	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	3.608.349.062,13	0,00	1.034.820.000,00	2.772.792.586,02	162.590.000,00	7.578.461.648,15
06.1.04.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.608.349.062,13	0,00	1.034.820.000,00	2.772.792.586,02	162.590.000,00	7.578.461.648,15
07.	KESEHATAN	66.692.340.031,57	0,00	17.893.921.891,84	113.743.884.715,31	72.551.882.684,00	270.882.029.322,72
07.1.02.	KESEHATAN	66.692.340.031,57	0,00	17.893.921.891,84	113.743.884.715,31	72.551.882.684,00	270.882.029.322,72
08.	PARIWISATA DAN BUDAYA	2.420.343.569,00	0,00	319.370.000,00	7.043.153.185,94	2.838.491.500,00	12.621.358.254,94
08.2.16.	KEBUDAYAAN	0,00	0,00	36.600.000,00	5.547.400.000,00	136.000.000,00	5.720.000.000,00
08.3.02.	PARIWISATA	2.420.343.569,00	0,00	282.770.000,00	1.495.753.185,94	2.702.491.500,00	6.901.358.254,94
10.	PENDIDIKAN	454.420.092.379,55	0,00	5.868.994.000,00	23.683.514.001,82	19.948.707.500,00	503.921.307.881,37
10.1.01.	PENDIDIKAN	454.420.092.379,55	0,00	5.868.994.000,00	23.683.514.001,82	19.948.707.500,00	503.921.307.881,37
11.	PERLINDUNGAN SOSIAL	1.558.430.347,00	0,00	397.766.000,00	2.573.057.638,62	254.000.000,00	4.783.253.985,62
11.1.06.	SOSIAL	1.558.430.347,00	0,00	397.766.000,00	2.573.057.638,62	254.000.000,00	4.783.253.985,62
	Jumlah	643.761.092.132,76	294.606.468.203,20	52.920.626.032,84	360.772.376.526,87	267.774.863.516,56	1.619.835.426.412,23

BUPATI SAMEAS,

ttd.

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MARJUNI, S.H

Pembina TR (IV/b)

NIP. 19630612 199710 1 001

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH

NOMOR 10 TAHUN 2017

TANGGAL 14 DESEMBER 2017

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2017

GOLONGAN / RUANG	ESELON				NON ESELON				JUMLAH
	I	II	III	IV	TENAGA FUNGSIONAL			STAF	
					PENDIDIKAN	KESEHATAN	LAINNYA		
Golongan IV/e	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Golongan IV/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan IV/c	0	20	0	0	0	0	0	0	20
Golongan IV/b	0	3	52	1	44	2	0	5	107
Golongan IV/a	0	0	73	28	2.036	9	11	6	2.163
JUMLAH GOLONGAN IV	2	23	125	29	2.080	11	11	11	2.292
Golongan III/d	0	0	26	271	386	124	29	12	848
Golongan III/c	0	0	0	168	331	81	16	29	625
Golongan III/b	0	0	0	48	469	108	27	212	864
Golongan III/a	0	0	0	1	375	259	5	338	978
JUMLAH GOLONGAN III	0	0	26	488	1.561	572	77	591	3.315
Golongan II/d	0	0	0	0	47	72	8	134	261
Golongan II/c	0	0	0	0	26	24	4	365	419
Golongan II/b	0	0	0	0	4	2	1	111	118
Golongan II/a	0	0	0	0	1	1	0	119	121
JUMLAH GOLONGAN II	0	0	0	0	78	99	13	729	919
Golongan I/d	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Golongan I/c	0	0	0	0	0	0	0	18	18
Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	0	4	4
Golongan I/a	0	0	0	0	0	0	0	2	2
JUMLAH GOLONGAN I	0	0	0	0	0	0	0	29	29
TOTAL	2	23	151	517	3.719	682	101	1.360	6.555

BUPATI SAMBAS,

ttd.

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MARJUNI, S.H

Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

KABUPATEN SAMBAS
 DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2017

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar hukum penyertaan modal (investasi daerah)	Bentuk penyertaan modal (investasi daerah)	Jumlah modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu	Penyertaan modal tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah daerah ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1	2000	Bank Kalbar	Perda APBD	Saham	750.000.000,00	-	750.000.000,00	-	-	-	12	750.000.000,00
2	2001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2003	Bank Kalbar	Perda APBD	Saham	493.000.000,00	-	1.243.000.000,00	(750.000.000,00)	-	-	-	-
5	2004	Bank Kalbar	Perda APBD	Saham	457.000.000,00	-	1.700.000.000,00	(1.243.000.000,00)	-	-	-	1.243.000.000,00
6	2005	Bank Kalbar	Perda APBD	Saham	1.024.000.000,00	-	2.724.000.000,00	(1.700.000.000,00)	-	-	-	1.700.000.000,00
7	2005	Bank Kalbar	Perda APBD	Saham	336.000.000,00	-	3.060.000.000,00	(2.724.000.000,00)	-	-	-	2.724.000.000,00
8	2006	Bank Kalbar	Perda APBD	Saham	36.000.000,00	-	3.096.000.000,00	(3.060.000.000,00)	-	-	-	3.060.000.000,00
9	2006	Bank Kalbar	Perda APBD	Saham	1.500.000.000,00	-	4.596.000.000,00	(3.096.000.000,00)	-	-	-	3.096.000.000,00
10	2007	Bank Kalbar	Perda APBD	Saham	1.500.000.000,00	-	6.096.000.000,00	(4.596.000.000,00)	-	-	-	4.596.000.000,00
11	2008	Bank Kalbar	Perda APBD	Saham	1.170.000.000,00	-	7.266.000.000,00	(6.096.000.000,00)	-	-	-	6.096.000.000,00
12	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	2010	Bank Kalbar	Perda APBD	Saham	1.678.000.000,00	-	8.944.000.000,00	(7.266.000.000,00)	-	-	-	7.266.000.000,00
14	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	2012	Bank Kalbar	Perda APBD	Saham	3.040.164.303,70	-	11.984.164.303,70	(8.944.000.000,00)	-	-	-	8.944.000.000,00
16	2013	Bank Kalbar	Perda APBD	Saham	2.369.309.821,02	-	14.353.474.124,72	(11.984.164.303,70)	-	-	-	11.984.164.303,70
17	2014	Bank Kalbar	Perda APBD	Saham	10.572.824.287,03	-	24.926.298.411,75	(14.353.474.124,72)	-	-	-	14.353.474.124,72
18	2014	PDAM Sambas	Perda APBD	Uang	1.674.714.100,00	-	26.601.012.511,75	(24.926.298.411,75)	-	-	-	24.926.298.411,75
19	2015	Bank Kalbar	Perda APBD	Saham	8.000.000.000,00	-	34.601.012.511,75	(26.601.012.511,75)	-	-	-	26.601.012.511,75
20	2015	PDAM Sambas	Perda APBD	Uang	2.000.000.000,00	-	36.601.012.511,75	(34.601.012.511,75)	-	-	-	34.601.012.511,75
21	2016	Bank Kalbar	Perda APBD	Saham	8.000.000.000,00	-	44.601.012.511,75	(36.601.012.511,75)	-	-	-	36.601.012.511,75
22	2016	PDAM Sambas	Perda APBD	Uang	2.000.000.000,00	-	46.601.012.511,75	(44.601.012.511,75)	-	-	-	44.601.012.511,75
23	2017	PDAM Sambas	Perda APBD	Uang	2.500.000.000,00	-	49.101.012.511,75	(46.601.012.511,75)	-	-	-	46.601.012.511,75

Keterangan : Tahun 2017 Rencana Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

BUPATI SAMBAS,

ltd.

ATBAH ROMIN SUJAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Kepala Bagian Hukum,

MARJUNIL S.H

Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

KABUPATEN SAMBAS
 DAFTAR PINJAMAN DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2017

No	Tahun Penarikan Pinjaman	Sumber Pinjaman Daerah	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Masa Pinjaman	Masa Tenggang	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Pagu Pinjaman	Kumulatif Pembayaran Kewajiban	Tunggakan	Saldo Pinjaman
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2011	Bank KalBar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	Membayai belanja pelayanan publik dan penyediaan layanan umum.	6 Bulan	-	28 Juni 2012	13%	36.888.730.975,00	36.888.730.975,00	-	0,00
2	2012	Bank KalBar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	Membayai belanja pelayanan publik dan penyediaan layanan umum.	6 Bulan	-	27 Juni 2013	13%	46.793.129.000,00	46.793.129.000,00	-	0,00
3	2013	Bank KalBar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	Membayai belanja pelayanan publik dan penyediaan layanan umum.	6 Bulan	-	30 Juni 2014	13%	51.746.521.770,00	51.746.521.770,00	-	0,00
4	2014	Bank KalBar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	Membayai belanja pelayanan publik dan penyediaan layanan umum.	6 Bulan	-	30 Juni 2015	13%	28.587.832.929,00	28.587.832.929,00	-	0,00
5	2015	Bank KalBar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	Membayai belanja pelayanan publik dan penyediaan layanan umum.	5 Bulan	-	30 Desember 2016	13%	42.497.000.000,00	42.497.000.000,00	-	0,00
6	2016	Bank KalBar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	Membayai belanja pelayanan publik dan penyediaan layanan umum.					54.239.000.000,00	54.239.000.000,00		0,00
7	2017	Bank KalBar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	Membayai belanja pelayanan publik dan penyediaan layanan umum.	6 Bulan		27 Juni 2018	10,5%	74.960.000.000,00	74.960.000.000,00		74.960.000.000,00

BUPATI SAMBAS,

ttt.

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Kepala Bagian Hukum,



MARJUNUS H

Pembina Tk I (IV/b)
 NIP. 19680612 199710 1 001